

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dinamika rivalitas hegemonik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik telah bertransformasi dari sekadar kompetisi pengaruh konvensional menjadi tekanan struktural yang multidimensional. Tekanan tersebut termanifestasi dalam bentuk *decoupling* ekonomi, penguasaan rantai pasok teknologi strategis, hingga eskalasi postur militer melalui pembentukan pakta keamanan minilateral dan peningkatan asertivitas klaim teritorial. Dalam merespons konstelasi yang semakin terpolarisasi tersebut, Indonesia memosisikan diri sebagai aktor rasional yang proaktif. Berlandaskan pada nilai-nilai filosofis Pancasila dan doktrin politik luar negeri "Bebas-Aktif" sebagai *variabel intervening*, Indonesia berupaya memfiltrasi tekanan eksternal ke dalam formulasi kebijakan domestiknya. Kerangka normatif dan ideologis ini berfungsi mencegah pembuat kebijakan agar tidak terjebak dalam dikotomi keberpihakan asimetris maupun aliansi militer eksklusif (*bandwagoning*). Sebagai gantinya, kultur strategis tersebut mendorong aparatur negara untuk memformulasikan strategi *multi-alignment* yang berorientasi pada mitigasi efek rambatan (*spillover effect*) konflik, seraya mengoptimalkan pencapaian kemandirian ekonomi dan pemeliharaan otonomi strategis di tingkat global.

Dalam manajemen relasi dengan Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia mengimplementasikan strategi *hedging* komprehensif yang memadukan integrasi ekonomi pragmatis dengan preservasi kedaulatan teritorial. Pada dimensi geoekonomi, Tiongkok diposisikan sebagai mitra strategis dalam penyediaan kapital dan transfer teknologi guna mengakselerasi agenda hilirisasi sumber daya alam, khususnya dalam pengembangan fasilitas pengolahan nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV). Integrasi ini diidentifikasi sebagai komponen esensial dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Kendati demikian, asimetri

interdependensi ekonomi tersebut tidak serta-merta mereduksi independensi politik dan keamanan Indonesia. Melalui penerapan *hard hedging* maritim, Indonesia secara konsisten mengompartementalisasi isu ekonomi dari integritas wilayah. Sikap ini terefleksi pada penolakan tegas terhadap negosiasi bilateral yang berpotensi memberikan legitimasi pada klaim historis Nine-Dash Line Tiongkok di Laut Natuna Utara, mengingat klaim tersebut tidak selaras dengan ketentuan UNCLOS 1982. Intensifikasi patroli maritim oleh TNI AL dan Bakamla dalam memitigasi taktik *gray-zone* mengindikasikan bahwa determinan konstitusional terkait kedaulatan memiliki kedudukan suprematif dan bersifat non-transaksional terhadap insentif investasi material apa pun.

Di sisi lain, manajemen relasi dengan Amerika Serikat dikalibrasi melalui peningkatan kerja sama pertahanan komprehensif, dengan tetap mengedepankan pembatasan strategis berupa penolakan terhadap ikatan aliansi militer formal maupun penyediaan fasilitas pangkalan militer asing. Peningkatan intensitas latihan militer gabungan, seperti Super Garuda Shield, beserta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara-negara Barat, diinterpretasikan bukan sebagai bentuk keberpihakan ideologis. Sebaliknya, langkah tersebut difungsikan sebagai instrumen pembangunan kapasitas daya tangkal (*deterrence*) secara otonom serta upaya diversifikasi patron keamanan. Pada ranah geoekonomi, Indonesia menunjukkan resiliensi kedaulatan melalui penolakan terhadap tekanan kebijakan *de-risking* Amerika Serikat, khususnya dalam kerangka legislasi Inflation Reduction Act (IRA). Di tengah desakan Washington untuk membatasi keterlibatan modal Tiongkok pada sektor mineral kritis sebagai prasyarat akses menuju pasar energi bersih AS, pemerintah Indonesia merespons melalui upaya diplomasi berimbang yang tetap menolak intervensi terhadap struktur industri domestiknya. Berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, kebijakan penolakan terhadap intervensi struktural ini ditujukan

untuk memelihara stabilitas arus investasi dan menjamin keberlanjutan proses industrialisasi nasional.

Secara keseluruhan, melalui kerangka analitis Realisme Neoklasik, operasionalisasi kebijakan luar negeri Indonesia kontemporer merepresentasikan bentuk *statecraft* yang presisi, terukur, dan pragmatis. Melalui kalibrasi strategis yang kompleks, termasuk inisiatif pengajuan akses keanggotaan ganda pada blok ekonomi Global South (BRICS) serta Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pemerintah mendemonstrasikan kapasitasnya dalam mengoptimalkan manfaat dari berbagai kutub kekuatan global. Kemampuan pembuat kebijakan dalam mengompartementalisasi isu, khususnya dalam mengisolasi ketegangan keamanan dari kemitraan investasi ekonomi sentral, mengindikasikan efektivitas institusi dan kultur strategis domestik. Pendekatan *omni-directional balancing* ini memfasilitasi Indonesia dalam menyerap keuntungan finansial, memperluas akses pasar, serta memperoleh dukungan teknologis secara proporsional. Pada akhirnya, implementasi prinsip Bebas-Aktif berfungsi memelihara kedaulatan negara dari subordinasi geopolitik, sekaligus memperkuat relevansi peran Indonesia dalam menjaga ekuilibrium dan stabilitas arsitektur keamanan serta tata kelola ekonomi di kawasan Indo-Pasifik di tengah konstelasi persaingan hegemoni global.

4.2. Saran

Berdasarkan analisis terhadap implementasi prinsip Bebas-Aktif dan respons strategis Indonesia (khususnya pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto) dalam menghadapi tekanan struktural rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat, terdapat beberapa rekomendasi krusial yang dapat diformulasikan. Guna mempertahankan otonomi strategis dan meminimalisasi kerentanan dari polarisasi hegemoni, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah proaktif pada tiga dimensi utama:

1. Dimensi Geoekonomi

a. Akselerasi Diversifikasi Investasi (De-risking Asimetris)

Meskipun aliran modal Tiongkok terbukti krusial bagi keberhasilan program hilirisasi, pemerintah harus secara agresif memfasilitasi masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) dari aktor alternatif seperti Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah. Ketergantungan absolut pada satu patron ekonomi, khususnya di sektor mineral kritis, berisiko mengerdilkan daya tawar politik Indonesia di masa depan.

b. Penyelarasan Standar ESG (Environmental, Social, and Governance)

Untuk menembus hambatan proteksionisme Amerika Serikat, seperti Inflation Reduction Act (IRA), serta menyukseskan aksesi keanggotaan OECD, Indonesia harus memaksa industri domestik (termasuk *smelter* milik investor Tiongkok) untuk mematuhi standar lingkungan hidup dan tata kelola tenaga kerja internasional. Hal ini akan memperkuat argumen diplomasi Indonesia saat menegosiasikan Critical Minerals Agreement (CMA) dengan Washington.

c. Optimalisasi Manuver Keanggotaan Ganda

Keberadaan Indonesia di dalam BRICS dan proses aksesi OECD harus diorkestrasikan sebagai instrumen arbitrase ekonomi. Indonesia harus proaktif menjadi "jembatan" standar perdagangan antara Global South dan Global North.

2. Dimensi Keamanan dan Pertahanan Maritim

a. Prioritas Kapasitas White Hull (Bakamla)

Menghadapi taktik *gray-zone* Tiongkok di Laut Natuna Utara, respons militer konvensional berisiko memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memfokuskan alokasi anggaran pertahanan untuk memperbesar kuantitas dan kualitas armada *coast guard* (Bakamla) sebagai instrumen penegakan hukum sipil di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), guna memberikan respons yang tegas namun tidak provokatif.

b. Optimalisasi Transfer Teknologi (ToT) Alutsista

Dalam tren peningkatan interoperabilitas dan pembelian alutsista mutakhir dari blok Barat (Amerika Serikat dan Eropa), pemerintah harus memastikan adanya klausul Transfer of Technology yang mengikat. Hal ini esensial untuk memitigasi ketergantungan pasokan logistik militer di masa krisis dan membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri sesuai mandat Undang-Undang.

3. Dimensi Diplomasi Regional

a. Konsolidasi ASEAN Centrality sebagai *Buffer Zone*

Indonesia tidak boleh menghadapi tekanan hegemoni secara unilateral. Kepemimpinan Indonesia harus diarahkan untuk menyatukan faksi-faksi di dalam ASEAN yang berpotensi terpecah akibat tarikan pro-Tiongkok atau pro-AS. ASEAN harus didorong untuk merespons secara kolektif inisiatif keamanan minilateral (seperti AUKUS dan QUAD) agar stabilitas kawasan tidak didikte oleh kekuatan eksternal.

b. Percepatan Resolusi Code of Conduct (CoC) Laut Cina Selatan

Sebagai aktor *non-claimant* yang memegang prinsip UNCLOS 1982, Indonesia harus memanfaatkan pengaruh diplomatiknya untuk mendesak penyelesaian CoC yang substansial dan mengikat secara hukum dengan Tiongkok. Keberadaan instrumen hukum yang disepakati secara multilateral ini merupakan kunci utama untuk mende-eskalasi potensi konflik terbuka di teras depan kawasan Asia Tenggara.

Adapun studi ini merekomendasikan sejumlah lintasan riset lanjutan guna memperkaya diskursus akademik di bidang Hubungan Internasional:

1. Ekspansi Kerangka Analitis Realisme Neoklasik

Riset ini telah mengonfirmasi signifikansi ideologi Pancasila dan prinsip Bebas-Aktif sebagai *variabel intervening* yang esensial dalam memfiltrasi tekanan sistemik global. Bagi penelitian mendatang,

dianjurkan untuk memperluas parameter operasional dari kerangka Neoclassical Realism melalui integrasi variabel-variabel domestik tambahan secara lebih terperinci. Eksplorasi akademis terhadap dinamika politik faksional, termasuk di dalamnya peran elite birokrasi, konstelasi parlementer, serta pengaruh aktor ekonomi atau oligarki, maupun fluktuasi opini publik nasional (terutama yang teramplifikasi oleh media digital) sebagai *variabel intervening* komplementer sangat diperlukan. Interaksi kompleks antar-aktor domestik ini, misalnya bagaimana tarik-menarik kepentingan antara kementerian di bidang ekonomi yang bersifat pragmatis dengan institusi pertahanan yang berorientasi pada ancaman (*threat-oriented*), perlu dibedah lebih dalam. Analisis mendalam semacam ini diestimasikan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme konversi tekanan eksternal

2. Studi Komparatif Strategi Hedging dalam Konstelasi Regional Asia Tenggara

Guna memvalidasi ketahanan postulat yang menyatakan bahwa kultur strategis domestik mendeterminasi respons suatu entitas negara terhadap tekanan struktural, agenda riset selanjutnya direkomendasikan untuk mengadopsi pendekatan komparatif berdimensi regional. Upaya sistematis untuk membandingkan strategi *pragmatic hedging* Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan manuver strategis negara-negara kekuatan menengah lainnya di kawasan ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, atau Malaysia, berpotensi memberikan kontribusi substansial terhadap literatur. Ketiga negara pembanding tersebut memiliki paparan risiko struktural yang serupa, namun difiltrasi oleh sistem politik dan sejarah diplomasi yang distingtif, seperti implementasi diplomasi bambu Vietnam atau fluktuasi poros aliansi pertahanan Filipina. Analisis komparatif lintas-negara ini diyakini mampu mengelaborasi variasi respons dan limitasi kapasitas antarnegara dalam suatu kawasan regional yang terdisrupsi oleh polarisasi geoekonomi dan geostrategis yang identik. Pendekatan ini akan menguji

secara empiris sejauh mana keunikan variabel domestik mampu menahan atau justru mempercepat tarikan gravitasi polarisasi hegemoni.

3. Tinjauan Longitudinal atas Efikasi Manuver Institusional Ganda

Mempertimbangkan bahwa manuver diplomasi kontemporer, seperti inisiatif akses ganda Indonesia terhadap institusi BRICS dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta negosiasi Critical Minerals Agreement (CMA) dengan Amerika Serikat—merupakan fenomena yang memiliki implikasi strategis berjangka panjang, perumusan rancangan studi longitudinal di masa depan menjadi sangat krusial. Penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk mengukur secara presisi *outcome* definitif dari formulasi kebijakan tersebut, agar evaluasi akademis melampaui sekadar analisis retorika diplomasi atau euforia penandatanganan kesepakatan awal. Indikator terukur seperti rasio realisasi investasi langsung (FDI), tingkat keberhasilan transfer teknologi strategis, hingga metrik kuantitatif terkait insidensi pergesekan batas wilayah harus menjadi titik fokus pengamatan. Sebagai contoh, evaluasi akademis perlu dikembangkan guna mengukur efikasi konkret dari strategi multi-institusional ini dalam memitigasi risiko jebakan kelas menengah (*middle-income trap*), serta efektivitasnya dalam mereduksi eskalasi taktik *gray-zone* di wilayah perairan Laut Natuna Utara dalam proyeksi temporal lima hingga sepuluh tahun mendatang. Tinjauan proyektif ini pada akhirnya akan mampu membuktikan apakah manuver *hedging* tersebut merupakan desain arsitektur strategis yang berkelanjutan (*sustainable statecraft*) atau semata-mata taktik penundaan krisis (*buying time*).

Secara keseluruhan, konsistensi penjabaran ideologi Pancasila dan prinsip Bebas-Aktif tidak boleh jatuh pada sikap pasif (ekuidistansi semu). Indonesia harus terus mempraktikkan *pragmatic hedging* yang gesit, di mana kepentingan nasional, yakni kedaulatan wilayah dan transformasi ekonomi

menuju Indonesia Emas 2045, ditempatkan sebagai variabel determinan tertinggi yang tidak bisa dinegosiasikan dengan kekuatan besar mana pun.